

**PERSEPSI PETANI TERHADAP PERAN KELOMPOK TANI DALAM  
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI DESA BATUPUTIH LAOK KECAMATAN  
BATUPUTIH**

***FARMERS' PERCEPTIONS OF THE ROLE OF FARMER GROUPS IN  
DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FERTILIZER IN VILLAGE OF BATUPUTIH  
LAOK, SUBDISTRICT OF BATUPUTIH***

**SRI WAHYUNI<sup>1</sup>, FUAD HASAN<sup>2\*</sup>, ELYS FAUZIYAH<sup>3</sup>**

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura

\*E-mail: [fuad.hsn@gmail.com](mailto:fuad.hsn@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Kelompok tani memiliki peran penting dalam keberhasilan penyaluran pupuk subsidi. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi petani terhadap peran kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Batuputih Laok. Penelitian menggunakan data primer yang diambil melalui wawancara terstruktur menggunakan panduan kuesioner. Metode pengambilan sample yang digunakan yaitu multistage sampling terhadap 40 orang anggota kelompok tani yang berasal dari 8 sampel kelompok tani. Pengolahan data menggunakan statistic deskriptif. Peran kelompok tani sebagai wahana kerjasama berkategori sangat tinggi. Sedangkan untuk indikator kelas belajar dan unit produksi berkategori tinggi.*

**Kata Kunci :** Persepsi, Kelompok Tani, Pupuk Bersubsidi

**ABSTRACT**

*Farmer groups have an important role in the successful distribution of subsidized fertilizer. This research aims to determine farmers' perceptions of the role of farmer groups in distributing subsidized fertilizer in Batuputih Laok Village. The research used primary data taken through structured interviews using a questionnaire guide. The sampling method used was multistage sampling of 40 farmer group members from 8 farmer group samples. Data processing used descriptive statistics. The role of farmer groups as a vehicle for cooperation was in the very high category. Meanwhile, the indicators for learning classes and production units were in the high category.*

**Keyword :** Perception, Farming Groups, Subsidized Fertilizer

**PENDAHULUAN**

Sejak tahun 1969 sampai saat ini pemerintah mempunyai kebijakan subsidi pupuk yang diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET), akan tetapi kebijakan tersebut sempat dihentikan selama periode 1998 – 2002 karena adanya intervensi lembaga dana moneter internasional (IMF). Kebijakan subsidi pupuk dilanjutkan kembali pada Tahun

2003 hingga saat ini dengan terus mengalami perbaikan dalam mekanisme pendataan, penyaluran dan penebusannya melalui introduksi e-RDKK, Kartu Tani, Simluhtan dan Aplikasi T-Pubers (Fatika, 2021)

Tujuan pemberian subsidi adalah agar harga pupuk dapat dijangkau oleh petani sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai jenis dan dosis anjuran.

Tujuan ahir pemberian subsidi pupuk adalah peningkatan produktivitas pertanian, kualitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani (Darwis dan Supriyati, 2013). Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Subsidi Pupuk yang tidak sedikit. Dalam kurun waktu tahun 2018- 2021, realisasi subsidi pupuk berfluktuasi dari semula sebesar Rp33.612,7 miliar pada tahun 2018 meningkat menjadi menjadi Rp34.308,3 miliar pada tahun 2019 dan turun menjadi Rp27.155,3 miliar pada tahun 2021 (Kementerian Keuangan, 2023). Namun demikian demikian, tujuan tersebut belum tercapai dengan maksimal. Subsidi pupuk belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani (Dahiri dan Prasetyo, 2018).

Belum maksimalnya ketercapaian tujuan dari kebijakan subsidi pupuk karena kinerja penyaluran pupuk bersubsidi belum baik yang ditunjukkan oleh tidak tercapainya azas 6 tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga, tepat tempat dan tepat waktu (Zulaiha et al., 2018). Penelitian Nurliana, *et al.*, (2022) juga membuktikan bahwa kelangkaan pasok pupuk semakin meningkat setiap tahun yang dibarengi dengan ketidaktepatan sasaran dimana seharusnya subsidi pupuk dinikmati oleh

petani kecil malah dinikmati pihak lain. Petani di Desa Batuputih laok juga merasakan adanya permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi seperti ketidaksesuaian antara kebutuhan pupuk dengan pupuk bersubsidi yang dapat ditebus dan keterlambatan ketersediaan pupuk.

Kelompok tani mempunyai peran yang strategis dalam dalam berkontribusi mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam penyaluran pupuk bersubsidi (Simanjuntak et al., 2020). Hal tersebut berkaitan erat dengan salah satu fungsi kelompok tani yaitu sebagai unit produksi terutama dalam kemampuannya untuk memfasilitasi penerapan teknologi terutama pada pengadaan pupuk subsidi (Kementerian Pertanian RI, 2013). Peran kelompok tani dimulai dari penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang didampingi petugas penyuluh pertanian, penyeteroran RDKK kepada distributor, dan penyaluran pupuk subsidi kepada para petani (Simanjuntak, *et al.*, 2020). Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 47 Tahun 2017, Mulai tahun 2017 penebusan pupuk bersubsidi dilakukan dengan kartu tani. Oleh karena itu, kelompok tani juga mempunyai peran dalam pelaksanaan program kartu tani, seperti pendataan

anggota kelompok, pengumpulan dokumen persyaratan pendaftaran pembuatan kartu tani, melakukan pendaftaran kartu tani untuk anggota kelompok, dan bahkan sampai pada pembelian pupuk (Jorgi et al., 2019)

Hasil penelitian terdahulu terhadap peran kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Fitrah *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa peran kelompok tani berkategori baik. Sedangkan hasil penelitian Fanani et al. (2022) menyimpulkan kurangnya peran kelompok tani khususnya dalam mensosialisasikan kartu tani kepada anggota kelompoknya sehingga mengakibatkan penggunaan kartu tani yang relative rendah. Ependy dan Abubakar (2020) menemukan adanya kelompok tani yang beranggapan bahwa menyusun RDKK hanya sekedar formalitas dan bahkan RDKK disusun oleh petugas penyuluh pertanian. Penelitian Nugroho *et al.* (2018) menemukan adanya kelompok tani yang mengajukan RDKK tanpa melakukan pembaharuan.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya variasi peran kelompok tani dalam distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal kemampuan

kelompok tani dalam membuat perencanaan kebutuhan pupuk (Kautsar dan Makmur, 2020), pemahaman mekanisme penyusunan RDKK dan peran aktif anggota kelompok (Nugroho et al., 2018). Oleh karena itu dengan adanya permasalahan yang dihadapi petani di Desa Batuputih Laok dalam memperoleh pupuk bersubsidi dan adanya variasi peran kelompok tani dalam distribusi pupuk bersubsidi maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani terhadap peran kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan pada bulan September hingga November Tahun 2022. Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* atau sengaja dengan pertimbangan sebagian besar penduduk di Kecamatan Batuputih bekerja sebagai petani dan terdapat banyak kelompok tani yaitu sejumlah 45 kelompok.

Data primer dikumpulkan dari responden menggunakan teknik wawancara dengan daftar pertanyaan terstruktur. Responden

atau sampel penelitian diambil dengan teknik *Multistage Sampling* yaitu sebuah metode pengambilan sampel dengan memodifikasi atau memadukan beberapa teknik sampel dengan teknik sampel lainnya (Hasan, 2020). Adapun teknik yang dipadukan adalah *simple random sampling* dan *quota sampling*. Penentuan sampel dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi desa yang memiliki kelompok tani dan terdapat sebanyak 8 dusun.
2. Penentuan kelompok tani untuk dijadikan sampel kelompok tani secara random atau acak sebanyak 8 kelompok tani sesuai jumlah dusun.
3. Menentukan sampel penelitian dengan menggunakan kuota dimana masing-masing kelompok tani akan diambil 5 orang anggota sehingga diperoleh total sampel 40 petani. Penentuan sample ini juga dilakukan secara random atau acak dari setiap kelompok tani.

Indikator peran kelompok tani terhadap penyaluran pupuk bersubsidi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 (Tabel 1). Skala pengukuran untuk setiap

pernyataan adalah skala likert 1-5, yakni : 1= Sangat Kurang Berperan (SKB), 2 = Kurang Berperan (KB), 3 = Cukup Berperan (CB), 4 = Berperan (B), 5 = Sangat Berperan (SB).

**Tabel 1. Indikator Peran Kelompok Tani**

Indikator	Sub Indikator
Kelas Belajar	Peran kelompok tani dalam memberikan informasi terkait pupuk bersubsidi
	Peran kelompok tani dalam memberikan informasi terkait perubahan peraturan alokasi pupuk bersubsidi
	Peran kelompok tani dalam memberikan informasi terkait fungsi kartu tani
Wadah Kerjasama	Peran kelompok tani dalam menjalin kerjasama dengan kios pertanian
	Peran kelompok tani dalam menjalin kerjasama dengan penyuluh pertanian sebagai pendamping
	Peran kelompok tani dalam penyampaian ketersediaan pupuk bersubsidi
Unit Produksi	Peran kelompok tani dalam merencanakan pengisian data RDKK
	Peran kelompok tani dalam pengusulan pupuk bersubsidi
	Peran kelompok tani dalam pengisian data lahan pada Simluhtan

Sumber : Permentan Nomor 10 Tahun 2022

Permentan Nomor 82 Tahun 2013

Teknik analisis data menggunakan statistic deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata dengan rumus berikut:

- a. Penentuan Nilai Total

$$NT = \sum_{i=1}^n (skala_i \times frekuensi_i)$$

b. Penentuan nilai rata-rata ( $\bar{X}$ )

$$\bar{X} = \frac{\text{nilai total}}{(\sum \text{pertanyaan} \times \sum \text{responden})}$$

c. Penentuan kelas interval

$$\text{Interval} = (\text{skala tertinggi} - \text{skala terendah}) / \text{jumlah kategori}$$

d. Mencocokkan nilai rata-rata dengan kelas interval pada kategori skala likert

**Table 2. Kategori peran kelompok tani terhadap penyaluran pupuk bersubsidi**

Interval	Keterangan
1.00 - 1.80	Sangat rendah
1.81 - 2.60	rendah
2.61 - 3.40	Cukup
3.41 - 4.20	Tinggi
4.21 - 5.00	Sangat tinggi

Sumber: (Hasan, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi dikelompokkan menjadi 3 indikator yaitu peran kelompok tani sebagai kelas belajar, wadah kerjasama, dan unit produksi yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi. Dimana setiap indikator memuat 3 sub indikator pernyataan sebagai acuan untuk mendapatkan jawaban dari responden.

Hasil penelitian pada sub indikator peran kelompok tani sebagai kelas belajar pada Tabel 3 menunjukkan bahwa peran kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep memiliki nilai rata-rata sebesar 3.43 masuk dalam kategori tinggi. Diketahui juga bahwa dari ketiga sub indikator peran kelompok tani dalam memberikan informasi terkait pupuk bersubsidi memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi yaitu sebesar 4.28 masuk dalam kategori sangat berperan.

**Tabel 3. Peran Kelompok Tani Sebagai Kelas Belajar**

Sub Indikator	Jumlah Penilaian					Rata-rata
	SKB	KB	CB	B	SB	
Peran kelompok tani dalam memberikan informasi terkait pupuk bersubsidi	0	0	1	27	12	4.28
Peran kelompok tani dalam memberikan informasi terkait perubahan peraturan alokasi pupuk bersubsidi	0	1	27	12	0	3.28
Peran kelompok tani dalam memberikan informasi terkait fungsi kartu tani	0	14	23	3	0	2.73
	Rata-rata					3.43

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Menurut Zogar, *et al.*, (2022) kelas belajar merupakan salah satu peran kelompok tani dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota kelompoknya. Berdasarkan kondisi di lapang, responden menyatakan bahwa kelompok tani memiliki pertemuan rutin yang diadakan baik setiap minggu atau setiap bulannya sesuai kesepakatan kelompok masing-masing. Pertemuan tersebut biasanya dilakukan dengan agenda pengajian kelompok dan sebagai wadah bertukar informasi terkait pertanian baik tentang pupuk bersubsidi, perubahan kebijakan, maupun fungsi kartu tani untuk penebusan pupuk. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Irawati & Yantu (2015) bahwa adanya kelompok tani, para petani

dapat saling berinteraksi baik untuk berbagi pengalaman atau menyelesaikan masalah secara bersama. Namun, pada kenyataannya tidak semua kelompok memiliki agenda pertemuan bahkan tidak semua anggota mengikuti setiap pertemuan yang diadakan. Sehingga hal tersebut sedikit menjadi kendala apabila penyampaian informasi harus dilakukan secara berkelanjutan dari mulut ke mulut.

Penyampaian informasi baik terkait pupuk maupun lainnya yang menjadi pembahasan kelompok tani sangat bergantung pada wawasan dan pengetahuan kelompok tersebut terutama ketua dan pengurus. Dengan demikian informasi yang disampaikan oleh penyuluh ataupun dari pihak lain dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh ketua

maupun pengurus kelompok. Sehingga informasi penting yang sudah didapatkan dapat diteruskan dan dipahami juga oleh anggota. Dengan wawasan yang luas dan daya peka yang baik terkait pertanian diharapkan dapat menjadi salah satu faktor kemajuan kelompok tersebut. Berdasarkan kondisi dilapangan diketahui bahwa beberapa kelompok tani diketahui oleh petani yang memiliki rekam jejak pendidikan yang bagus sehingga mampu memimpin kelompoknya pada perkembangan pertanian. Hal ini sejalan dengan Sundari, *et.,al*, (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan petani dapat lebih luas apabila tingkat pendidikannya tinggi sehingga mampu mengadopsi inovasi untuk peningkatan produksi.

Alokasi pupuk bersubsidi tidak bisa lepas dari adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Di Tahun 2022 Pemerintah secara resmi mengubah kebijakan pupuk bersubsidi dengan menghapus jenis pupuk yang akan dialokasikan. Pada kebijakan sebelumnya yang dituangkan dalam Permentan No 41 Tahun 2021 jenis pupuk yang dialokasikan Pemerintah yaitu urea, NPK, SP-36, dan ZA. Namun berdasarkan Permentan No 10 Tahun 2022 pupuk yang dialokasikan oleh pemerintah hanya pada jenis Urea dan

NPK saja. Sebagai anggota kelompok tani dan penerima subsidi pupuk, para petani sudah sepatutnya untuk mengetahui tentang kebijakan terbaru tersebut. Sehingga dalam penyampaian informasi terkait kebijakan ini dilakukan oleh penyuluh pertanian kepada kelompok tani dalam agenda pertemuan rutin. Namun karena tidak semua kelompok memiliki agenda tersebut biasanya informasi ini dilakukan oleh penyuluh kepada ketua kelompok tani untuk diteruskan kepada anggotanya. Penyampaian informasi tersebut biasanya dilakukan oleh ketua kelompok secara langsung ketika kedua belah pihak bertemu atau bisa dilakukan secara berantai dari satu anggota ke anggota yang lainnya. Sehingga di Desa Batuputih Laok informasi terkait perubahan kebijakan ini sudah tersebar luas dan diketahui oleh para anggota kelompok tani.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi para anggota kelompok tani memerlukan kartu tani untuk penebusan. Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 14 responden yang menyatakan bahwa kelompok tani kurang berperan dalam memberikan informasi terkait kartu tani. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kartu tani merupakan sebuah kartu yang dikeluarkan oleh pihak perbankan khusus

untuk para petani yang dapat digunakan sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi menggunakan *Electronic Data Capture* (EDC) melalui pengecer resmi (Rigi, *et al.*, 2019). Pernyataan tersebut juga sesuai dengan isi dari Permentan No 10 Tahun 2022 terkait fungsi kartu tani. Dalam wawancara bersama anggota maupun ketua kelompok tani diketahui bahwa seluruh anggota kelompok tani sudah memiliki kartu tani. Namun, dalam prakteknya kartu tani tersebut diserahkan kepada kios pertanian dan penebusan subsidi pupuk oleh anggota dilakukan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini disebabkan karena belum adanya pembaharuan ulang terkait kuota pupuk

subsidi oleh pihak BNI'46. Sehingga untuk sementara waktu penebusan dilakukan menggunakan KTP sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Proses penebusan yang dilakukan dengan aplikasi T-Pubers yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh kios dalam menginput data penyaluran pupuk setiap bulannya (Kementan, 2022). Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara diketahui bahwa pembahasan terkait fungsi kartu tani hanya disampaikan di awal oleh kelompok tani bersama penyuluh pada saat kelompok tersebut akan menerima kartu tani. Kepemilikan kartu tani sendiri tidak menjadi jaminan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan subsidi pupuk.

**Tabel 4. Peran Kelompok Tani Sebagai Wahana Kerjasama**

Sub Indikator	Jumlah Penilaian					Rata-rata
	SKB	KB	CB	B	SB	
Peran kelompok tani dalam menjalin kerjasama dengan kios pertanian	0	0	0	11	29	4.73
Peran kelompok tani dalam menjalin kerjasama dengan penyuluh pertanian sebagai pendamping	0	1	6	25	8	4
Peran kelompok tani dalam penyampaian ketersediaan pupuk bersubsidi	0	0	9	20	11	4.05
	Rata-rata					4.26

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil penelitian pada sub indikator peran kelompok tani sebagai wahana kerjasama pada Tabel 4 menunjukkan bahwa peran kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep memiliki nilai rata-rata sebesar 4.26 masuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan tiga sub indikator tersebut diketahui bahwa peran kelompok tani dalam menjalin kerjasama dengan kios pertanian memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4.73 masuk dalam kategori sangat Tinggi.

Peran kelompok tani sebagai wahana kerjasama berdasarkan pernyataan Riani, *et al.*, (2021) menyatakan bahwa kelompok tani perlu melakukan kerjasama baik dengan sesama anggota maupun menjalin hubungan kerjasama dengan pihak koperasi dan dinas tertentu seperti penyedia modal, penyedia sarana produksi maupun penyedia teknologi. Berdasarkan hasil wawancara bersama responden diketahui bahwa kerjasama kelompok tani dengan kios pertanian berjalan cukup lancar. Hal ini perlu dilakukan karena penyaluran pupuk subsidi oleh pemerintah dialokasikan melalui kios pertanian sebagai perantara. Kondisi dilapangan menyatakan bahwa kios pertanian akan menyalurkan pupuk subsidi melalui ketua

kelompok tani. Setelah itu anggota dapat mengambil jatah dan melakukan penebusan di ketua kelompok masing-masing.

Kerjasama kelompok tani dalam mendapatkan pupuk tidak berhenti melalui kios pertanian saja namun juga melalui penyuluh pertanian. Menurut Azumah, (2019) keberadaan penyuluh juga memiliki peran penting dalam sirkulasi kebijakan pertanian kepada pertanian pedesaan. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa penyuluh pertanian akan melaksanakan penyuluhan berkaitan dengan pupuk bersubsidi atau hal lainnya setidaknya satu hingga tiga kali dalam setahun. Namun terdapat beberapa kelompok tani memang tidak terlalu memiliki hubungan yang intensif dengan penyuluh pertanian lapang. Hal ini disebabkan dengan banyak hal seperti adanya pergantian penyuluh lapang. Sehingga hal tersebut menghambat pendekatan penyuluh sebelumnya dengan kelompok tani mengingat keberadaan kelompok tani di Desa Batuputih Laok sangat banyak mencapai 45 kelompok tani. Selain melaksanakan penyuluhan, penyuluh lapang di Desa Batuputih Laok juga melakukan pendampingan kelompok tani sesuai perannya. Biasanya penyuluh melakukan pendampingan dengan

kelompok tani dalam melakukan pengisian RDKK maupun penebusan pupuk.

Penyampaian ketersediaan pupuk tidak hanya dilakukan oleh ketua kelompok, penyuluh lapang maupun kios pertanian namun juga disampaikan kepada pihak yang membutuhkan pupuk tersebut yang tidak lain anggota kelompok. Berdasarkan kondisi di lapangan responden menyatakan bahwa penyampaian ketersediaan pupuk dilakukan oleh ketua kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian informasi dapat dilakukan ketika adanya pertemuan kelompok tani maupun diluar pertemuan. Seperti yang disebutkan sebelumnya keterlibatan anggota dalam menyampaikan informasi juga diperlukan untuk membantu ketua kelompok tani dalam menyebarkan

informasi terkait. Kondisi ini merupakan bentuk kerjasama anggota kelompok yang diharapkan berdasarkan peran kelompok tani itu sendiri (Riani, *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian pada sub indikator peran kelompok tani sebagai unit produksi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa peran kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep memiliki nilai rata-rata sebesar 4.02 masuk dalam kategori Tinggi. Diketahui juga bahwa dari ketiga sub indikator peran kelompok tani dalam merencanakan pengisian data RDKK memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi yaitu sebesar 4.6 masuk dalam kategori sangat berperan.

**Tabel 5. Peran Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi**

Sub Indikator	Jumlah Penilaian					Rata-rata
	SKB	KB	CB	B	SB	
Peran kelompok tani dalam merencanakan pengisian data RDKK	0	1	1	11	27	4.6
Peran kelompok tani dalam pengusulan pupuk bersubsidi	0	1	3	31	5	4
Peran kelompok tani dalam pengisian data lahan pada SIMLUHTAN	0	0	24	14	2	3.45
	Rata-rata					4.02

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan pernyataan Riani, *et al.*, (2021) peran kelompok tani sebagai unit produksi merupakan kewajiban suatu kelompok tani untuk memberikan fasilitas sarana produksi sesuai kebutuhan anggotanya. Sarana atau fasilitas tersebut seperti traktor, benih unggul maupun pupuk. Untuk memberikan fasilitas pupuk bersubsidi kelompok tani perlu melakukan pengusulan kebutuhan pupuk yaitu dengan pengisian RDKK. Sebelum melakukan pengisian data RDKK kelompok tani perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu baik dengan anggota kelompoknya maupun dengan penyuluh. Hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan waktu pengisian RDKK sehingga anggota kelompok dapat menyiapkan dokumen yang diperlukan. RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok merupakan suatu perhitungan mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani menurut penggunaan pupuk masing-masing anggotanya yang dapat dijadikan sebagai acuan produsen maupun pemerintah dalam menetapkan alokasi pupuk bersubsidi (Sugiono & Gufroniah, 2023).

Peran kelompok tani dalam pengusulan pupuk bersubsidi di Desa Batuputih Laok berdasarkan pernyataan responden sudah termasuk baik dan berperan. Responden menyatakan bahwa

kelompok tani akan melakukan pengusulan pupuk bersubsidi setiap tahunnya. Hal ini dilakukan oleh kelompok tani karena anggota pasti akan membutuhkan pupuk dalam berusahatani dan memperoleh harga pupuk yang lebih terjangkau. Bahkan beberapa kelompok tani yang tidak memiliki kegiatan rutin atau dalam kata lain kurang aktif juga akan mengajukan usulan subsidi pupuk. Keberadaan kelompok tani oleh para anggota kelompok menjadi sarana yang penting dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Sesuai dengan isi Permentan Nomor 10 Tahun 2022 bahwa tergabung dalam kelompok tani merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah.

Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pelaksanaan pengisian dan penyusunan RDKK dilakukan oleh ketua kelompok secara musyawarah dengan didampingi penyuluh. Namun, beberapa kelompok di lapangan melakukan pengisian yang dilakukan secara satu persatu mendatangi anggota kelompoknya dikarenakan beberapa dari anggota kelompok tani merupakan lansia dan buta huruf, dimana ketua akan membantu anggota dalam melakukan pengisian data. Dalam hal ini ketua akan meminta

beberapa dokumen seperti KTP untuk keperluan identitas. Selain itu berkaitan dengan luas lahan, komoditas yang diusahakan, jenis dan berapa kebutuhan pupuk yang diperlukan dalam satu tahun kedepan merupakan informasi yang dapat disampaikan oleh anggota guna pengusulan pupuk bersubsidi dalam pengisian RDKK tersebut. Kedua, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyuluh lapang terkait kelengkapan dan kebenaran data RDKK sehingga dapat disetujui dan ditandatangani. Ketiga, data RDKK yang berhasil disusun kemudian dibuat rangkap 5 untuk diberikan kepada pengecer resmi, kepala desa, penyuluh, ketua gapoktan dan ketua kelompok. Setelah mendapat persetujuan dari pihak tersebut akan dilakukan rekapitulasi data RDKK secara berurutan pada tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan), kabupaten (Dinas Pertanian), provinsi (Badan Koordinasi Penyuluhan), hingga tingkat pusat (Kementerian Pertanian).

Pengusulan pupuk bersubsidi sesuai pengisian data RDKK oleh kelompok tani akan melalui tahap penginputan data tersebut pada system e-RDKK yang terintegrasi dengan Simluhtan (Sistem Informasi Penyuluh Pertanian). Meskipun kelompok tani tidak secara langsung melakukan pengisian data pada

Simluhtan, namun setelah berhasil melakukan pengisian data RDKK, data tersebut akan diserahkan kepada pihak penyuluh. RDKK yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua kelompok selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenarannya sehingga dapat ditandatangani dan disetujui oleh pihak. Tahapan ini sebenarnya bertujuan agar masyarakat terutama petani tidak sembarangan dan dapat membeli pupuk di kios usulan pemerintah sesuai data yang diajukan (Khoiriyah, *et al*, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi petani terhadap peran kelompok tani secara keseluruhan 3 indikator adalah berperan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai yang cukup tinggi dari 3 indikator yaitu kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi dan diketahui dari peran kelompok dalam menyebarkan informasi serta pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, apabila dilihat dan diukur terkait efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan 5T (tepat harga, waktu, jenis, tempat, dan jumlah) di Desa Batuputih Laok ini masih belum dapat dikatakan efektif.

Ketepatan harga sendiri dapat diukur dari harga yang harus dikeluarkan

petani dalam membeli pupuk subsidi sesuai dengan HET (Nugroho, *et.al*, 2018). Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga dari kebijakan pemerintah yang telah ditentukan untuk pupuk urea yaitu sebesar Rp112.500 dan pupuk NPK sebesar Rp115.000 (Defita & Adnan, 2023). Sedangkan harga yang harus dibayar oleh anggota kelompok dalam penebusan pupuk tersebut yaitu sekitar Rp120.000 per karungnya baik untuk jenis pupuk urea maupun NPK. Harga tersebut lebih tinggi dari HET yang ditentukan karena dalam proses pengiriman pupuk subsidi dari kios pertanian kepada kelompok tani memerlukan biaya transportasi.

Kemudian dari segi ketepatan waktu, petani di wilayah penelitian seringkali mengalami keterlambatan dalam penerimaan pupuk bersubsidi. Kondisi ini biasanya terjadi dengan kemunduran pengiriman sekitar 1 hingga 2 minggu dari yang seharusnya. Kondisi tersebut biasanya terjadi di awal musim tanam atau awal tahun. Menurut Painneon, *et al.*, (2022) salah satu penyebab keterlambatan pengiriman pupuk yaitu keterlambatan dalam penginputan RDKK oleh penyuluh dan kelompok tani. Kune, *et al*, (2021) juga menyatakan bahwa penyebab tidak efektivitasnya distribusi pupuk yaitu keterlambatan atau ketersediaan pupuk

bersubsidi yang tidak sesuai dengan masa tanam. Indikator tepat tempat dimaksudkan pada pembelian pupuk subsidi yang harus dilakukan di kios atau pengecer resmi yang telah ditunjuk dan dipilih oleh distributor di wilayah tersebut (Adiraputra & Supyandi, 2021). Kondisi yang terjadi dilapangan sudah sesuai dimana petani mendapatkan dan dapat melakukan penebusan di kios pertanian yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani diketahui bahwa semua jenis subsidi pupuk yaitu Urea dan NPK yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan jenis pupuk yang banyak di butuhkan oleh petani di lokasi penelitian. Sedangkan jumlah subsidi yang disalurkan pemerintah kepada kelompok tani dianggap masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan tidak sesuai dengan jumlah yang telah diusulkan dalam RDKK. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu berdasarkan pernyataan penyuluh pertanian di lokasi penelitian menyatakan bahwa kuota yang disalurkan memang terbatas dari pemerintah pusat, pengurangan kuota akibat dari tidak ditebusnya subsidi pupuk pada periode sebelumnya oleh beberapa anggota karena masalah keuangan. Sehingga menyebabkan kelompok yang bersangkutan menerima

sanksi dimana pupuk yang disalurkan disesuaikan dengan kuantitas atau jumlah pupuk pada penebusan sebelumnya. Fenomena tersebut sejalan dengan pernyataan Khoiriyah, *et al.*, (2022) bahwa kondisi ini dapat menyulitkan kelompok tani karena apabila pupuk tidak segera di tebus maka kelompok tani bisa mendapatkan sanksi. Sehingga pupuk tersebut akan diarahkan ke kelompok lain. Selain itu jumlah penggunaan pupuk oleh petani yang tidak selalu sesuai dengan jumlah yang diusulkan pada RDKK. Terlebih lagi beberapa petani di lapangan yang memiliki luas lahan lebih dari 2 ha.

Berdasarkan hasil penelitian dan kondisi yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi masih belum dapat optimal. Hal ini diketahui adanya ketidaktepatan atau ketidaksesuaian pada segi harga, jumlah, dan waktu penyaluran. Sedangkan pada segi jenis dan tempat sudah sesuai.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran kelompok tani sebagai wahana kerjasama dalam penyaluran pupuk bersubsidi kategori sangat Tinggi. Sedangkan untuk indikator kelompok tani sebagai kelas belajar dan unit produksi

masuk dalam kategori Tinggi. Persepsi petani menyatakan bahwa kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi berkategori Tinggi. Guna meningkatkan peran kelompok tani, diperlukan pendampingan yang lebih intensif oleh petugas penyuluh kepada kelompok tani dan peran serta aktif anggota khususnya dalam penyusunan RDKK.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiraputra, P., & Supyandi, D. (2021). Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 594–606.
- Azumah, S. B. (2019). Fertilizer Subsidy and Rice Productivity in Ghana : A
- Chalil, D., & Barus, R. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Medan: USU Press.
- Dahiri dan Prasetyo, A. (2018). Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan Padi Jagung Kedelai. *Jurnal Budget*, 3(2): 21-39
- Darwis, V. dan Supriyati, (2014). Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1): 45-60
- Defita, I., & Adnan, M. F. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Kecamatan Sungai Tarap. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 74–80.

- Ependy, A. dan Abubakar, R. (2020). Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Ke Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. *SOCIETA*, 9(2): 1-16
- Fanani,A., Zainuddin, A., dan Desfaryani, R. (2022.) Dampak Adanya Kelembagaan Pertanian Terhadap Keputusan Petani Dalam Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Jember. *Jurnal Rkonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 6(3): 921-929
- Fatika, Y.H, (2021). Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi : 5 (Lima) Potensi Maladministrasi Dan Upaya Perbaikannya: Kajian Sistemik Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.  
[https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB\\_LI\\_5a1ea99397156\\_file\\_20211203\\_171112.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB_LI_5a1ea99397156_file_20211203_171112.pdf)
- Hasan, F. (2020). *Metode Riset Bisnis*. Bangkalan: UTM Press.
- Jorgi, R.S., Gayatri, S., dan Dalmyiatun, T. (2019) Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(2): 88-98
- Kautsar, M.R., Sofyan, Makmur, T. (2020). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi (*Oryza Sativa*) Di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar *Jurna Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(1): 97-107
- Kementerian Keuangan, (2023). Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Kemenkeu RI. Jakarta.
- Kementan (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi*.
- Kementerian Pertanian RI. 2013. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. (2020). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 (revisi)*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. 2021. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*.
- Kementerian Pertanian RI. (2022). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*. Jakarta.
- Khoiriyah, N., Yuniar, R., Octaviani, R., Wibhisono, I. F., & Ariwangsa, I. G. P. A. (2022). Optimalisasi Kapaitas SDM Kelompok Tani Kampung Kukuk Sumpung Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 28–35.
- Kune, S. J., Nubatonis, A., Sipayung, B. P., & Mambur, Y. P. V. (2021) Pengambilan Keputusan dan Preferensi Petani Menggunakan Pupuk Subsidi di Kecamatan Sentra Padi Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Kecamatan Biboki Anleu). *Jurnal Agribisnis Lahan*

*Kering*, 6(4), 194–202.

Nugroho, A. D., Siregar, A. P., Andannari, E., Shafiyudin, Y., & Christie, J. I. (2018). Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(1), 70–82.

Nurliana, Taufik, Y., & Daud, L. (2022). Dinamika Penyediaan Pupuk Subsidi Pada Usaha Tani Sawah Melalui Mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Di Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Inovasi Dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*, 1(1), 17–26.

Painneon, E. A., Sipayung, B. P., Taena, W., & Matoneng, O. W. (2022). Pengaruh Kinerja Penyuluh Terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi (Suatu Kasus Di Desa Oepuh Selatan). *MAHATANI*, 5(1), 1–20.

Riani, Zuriani, Zahara, H., & Hafizin. (2021). Fungsi Kelompok Tani Pada Usahatani Padi Sawah di Gampong Uteun Bunta Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *Jurnal AGRIFO*, 6(1), 23–30.

Rigi, N., Raesi, S., & Azhari, R. (2019). Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *JOSETA: Journal of Socio Economic on*

*Tropical Agriculture*, 1(7), 75–83.

Simanjuntak, S. A., Diarta, I. K. S., & Sarjana, I. M. (2020) Peranan Kelompok Tani Sehat Terhadap Keberhasilan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Nagori Dolok Marlawan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 9(3), 367–374.

Sugiono, & Gufroniah, S. F. (2023) Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 371–385.

Sundari, R. S., Umbara, D. S., Hiidayati, R., & Fitriadi, B. W. (2021). Peran Penyuluh Pertanian terhadap Produksi Padi Sawah di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 10(1), 59–67.

Zogar, A. U., Retang, E. U. K., & Djoh, D. A. (2022). Peran Kelompok Tani Terhadap Produktivitas Usahatani Padi Sawah Di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai. *Jurnal Iliah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9(2), 548–562.

Zulaiha, A.R., Nurmalina, R., dan Sanim, B. (2018). Kinerja Subsidi Pupuk Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 4(2): 271-283